



Pengaruh beras terhadap budaya pemanfaatan sagu di Maluku

ARI NALDI^{1*}, BELATHEA CHASTINE²

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia;

² Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia;

*Korespondensi: arinaldi11.aa@gmail.com

ABSTRACT

People in the eastern part of Indonesia - Papua, West Papua, North Maluku, and Maluku, are the majority of the Indonesian population who utilize sago trees as a source of food and for other needs. Unfortunately, the culture of sago utilization in these areas, especially Maluku, has begun to degrade along with cultural changes over time since the Transmigration and Green Revolution programs were implemented by the Central and Local Governments. In this research, there are problems that need to be analyzed related to the main factors of the cultural evolution of staple food consumption, from sago to rice, so that it can threaten the sustainability of sago plants in Maluku Province. This research uses a literature review approach by utilizing journal articles, reports of government and non-government institutions, and other textual documents to be processed using the content analysis method. The data that has been selected is contextualized into the research article and linked to the theory of cultural evolution to discuss the cultural changes occurring in Maluku in relation to political, population and environmental pressures. In this research, it is found that political policies, Transmigration and Green Revolution, can be said to be the main factors of the cultural degradation of sago utilization in Maluku in many aspects, both for food consumption and for other needs.

KEYWORDS: culture; green revolution; Maluku; sago; transmigration

ABSTRAK

Masyarakat di bagian timur Indonesia - Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku, adalah sebagian besar penduduk Indonesia yang memanfaatkan pohon sagu sebagai sumber pangan dan untuk kebutuhan lainnya. Sayangnya, budaya pemanfaatan sagu di daerah-daerah tersebut, khususnya Maluku, mulai terdegradasi seiring dengan adanya perubahan budaya secara berjangka sejak program Transmigrasi dan Revolusi Hijau diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini, terdapat permasalahan yang perlu dianalisis terkait faktor utama dari adanya evolusi budaya konsumsi panganan pokok, dari sagu ke beras, sehingga dapat mengancam keberlanjutan tanaman sagu di Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan memanfaatkan artikel jurnal, laporan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta dokumen tekstual lainnya untuk kemudian diolah menggunakan metode konten analisis. Data-data yang telah dipilih, digunakan secara kontekstual ke dalam artikel penelitian dan dikaitkan dengan teori evolusi budaya untuk membahas perubahan budaya yang terjadi di Maluku dengan kaitannya terhadap tekanan politik, populasi, dan lingkungan. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan politik, Transmigrasi dan Revolusi Hijau, dapat dikatakan sebagai faktor utama dari adanya degradasi budaya pemanfaatan sagu di Maluku dalam banyak aspek, baik untuk konsumsi pangan ataupun untuk kebutuhan lainnya.

KATA KUNCI: budaya; Maluku; revolusi hijau; sagu; transmigrasi

Cite This Article:

Naldi, A., & Chastine, B. (2024). Pengaruh beras terhadap budaya pemanfaatan sagu di Maluku. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(2), 103-118. <https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i2.2024.565>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Beras dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Ketergantungan pada beras terus meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan populasi Indonesia, yaitu sekitar 1,33% dari total populasi antara tahun 2010 hingga 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019b). Pada tahun 2017, menurut Badan Pusat Statistik (2019a), masyarakat Indonesia telah mengonsumsi total 29.113.513 ton beras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran dan katering, industri mikro/makro, layanan kesehatan, dan layanan atau jasa lainnya. Masyarakat di Pulau Jawa adalah konsumen beras terbesar di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat teratas dengan jumlah kebutuhan sebanyak 6.147.050 ton beras, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur – 4.272.900 ton, dan Jawa Tengah – 3.686.470, sementara Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, mengonsumsi 1.228.250 ton beras pada tahun 2017. Namun, tidak semua orang Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok mereka. Orang-orang yang tinggal di bagian timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Provinsi Maluku, sebagian penduduknya masih memanfaatkan sagu sebagai sumber makanan sehari-hari mereka yang umumnya diolah menjadi papeda.

Pohon sagu adalah salah satu tanaman jenis palem (seperti kelapa dan sawit) yang berasal dari Papua dan/atau daerah Maluku. Beberapa penelitian mengidentifikasi pusat keanekaragaman sagu berada di Maluku, tetapi ada juga beberapa penulis yang berpendapat bahwa Papua dan daerah sekitarnya (termasuk Maluku) adalah pusat keanekaragaman pohon sagu, karena banyak jenis sagu yang tumbuh baik secara alami maupun dibudidayakan di sana (Ehara, Susanto, Mizota, Hirose, & Matsuno, 2000). Berdasarkan penelitian Ehara et al. (2000), dilaporkan bahwa Indonesia memiliki empat varietas lokal yang tumbuh di Toliwang, Halmahera, dan empat varietas lokal tumbuh di Ternate. Selain itu, sepuluh varietas lokal diklasifikasikan ke dalam empat jenis di Sorong, Irian Jaya (sekarang Papua). Pulau Papua, dibagi antara Papua Nugini (PNG) dan Indonesia, memiliki sumber daya sagu gabungan terbesar, dengan lebih dari 2 juta ha atau 88% dari stok sagu global (Schuiling, 1995). Indonesia memiliki wilayah penanaman sagu terbesar (tegakan semi-budidaya) dan hutan sagu (tegakan liar), serta keanekaragaman genetik palem yang kaya. Diperkirakan, dunia memiliki total luas perkebunan sagu dan hutan sagu lebih dari dua juta hektar, dengan lebih dari satu juta hektar berlokasi di Indonesia (Flach, 1997). Sebagian besar dari 1,25 juta ha pohon sagu yang tersebar di Indonesia, terletak di (gabungan) Provinsi Papua Barat dan Papua, yaitu sekitar 1,2 juta ha dan sisanya tersebar luas di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2018).

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak persediaan sagu, baik yang tumbuh secara alami ataupun dibudidayakan. Sebagian besar sagu di Maluku dapat ditemukan di Pulau Seram, tempat yang diindikasikan sebagai daerah asal dan tempat tinggal penduduk asli Maluku. Pulau Seram adalah pulau terbesar (18.410 km²) di antara 1.412 pulau yang tersebar di Provinsi Maluku, terbentang sekitar 60 km dari utara ke selatan dan sekitar 340 km dari barat ke timur (DPMPTSP-Maluku, 2018). Pulau ini terletak di utara Ambon, ibu kota Maluku. Sebagian besar orang Maluku memanfaatkan sagu sebagai bahan makanan pokok mereka, karena sagu juga dikenal sebagai tanaman asli yang telah lama tumbuh di hutan Seram dan telah dikonsumsi oleh para pendahulu mereka sejak bertahun-tahun yang lalu (Ellen, 2016). Namun, sagu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh saja.

Salah satu suku asli Maluku, yaitu Suku Nuaulu, memanfaatkan sagu untuk memenuhi kebutuhan lain seperti untuk ritual adat, bahan bangunan untuk rumah, atau alat perang seperti busur dan anak panah (Ellen, 2006). Sayangnya, pemanfaatan pohon sagu semakin berkurang dari waktu ke waktu sejak Pemerintah Indonesia memperkenalkan beras kepada masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku diperkenalkan dengan padi/beras secara intensif sejak Pemerintah Indonesia mengampanyekan program transmigrasi pada tahun 1969—1999. Transmigran yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa dengan “terpaksa” mengonversi

sebagian lahan di daerah penempatannya menjadi lahan padi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan secara langsung memperkenalkan beras ke masyarakat lokal di sana, seperti di Maluku (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015; Whitten, 1987).

Program transmigrasi memiliki tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di Indonesia dengan memindahkan penduduk dari daerah padat di Pulau Jawa ke daerah jarang penduduk di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Namun, di satu sisi, program transmigrasi tidak mampu berkontribusi banyak terhadap program Revolusi Hijau yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto (Presiden Indonesia tahun 1966—1998) karena faktanya tidak semua lahan di Indonesia, di luar Pulau Jawa, cocok untuk ditanami padi (Davidson, 2018). Selama program Revolusi Hijau dilaksanakan, proses ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian dilakukan untuk meningkatkan produksi padi. Secara khusus, proses ekstensifikasi lahan pertanian telah membawa dampak pada hilangnya sebagian besar tanaman lokal di daerah yang terdampak, seperti hilangnya beberapa hutan sagu (tegakan liar) di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram. Pergeseran makanan pokok orang Maluku dari sagu ke beras perlahan-lahan terjadi sejak Provinsi Maluku menyambut para transmigran Jawa untuk menyelesaikan program pembangunan nasional di bawah rezim Soeharto (Tjiptoherijanto, 1996).

Kehadiran para transmigran Jawa di tanah Maluku, menghadirkan budaya baru bagi masyarakat lokal. Salah satu budaya baru yang diterima oleh masyarakat Maluku adalah budaya pertanian padi yang secara langsung berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat, dari sagu ke beras sebagai makanan pokok. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial-budaya masyarakat, tetapi juga pada aspek lingkungannya. Secara bertahap, alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, memiliki dampak pada berkurangnya jumlah pohon sagu karena sebagian besar sagu yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal adalah pohon sagu yang tumbuh alami di hutan (tidak dibudidayakan).

1.1 Teori Evolusi Budaya

Menurut Mesoudi (2016), evolusi budaya adalah teori tentang perubahan budaya pada manusia, sedangkan spesies lain (hewan dan tumbuhan) dapat digambarkan sebagai proses evolusi Darwin. Hal tersebut membuat banyak konsep, alat, dan metode yang digunakan oleh para ahli biologi untuk mempelajari evolusi biologis dapat juga diterapkan untuk mempelajari perubahan budaya. Selain itu, menurut Mesoudi (2009) juga, konsep evolusi budaya dapat dikaitkan dengan tiga prinsip dasar dari teori evolusi Darwin yang telah diformulasikan dalam konsep kebudayaan, yaitu:

1. Variasi: Informasi budaya bervariasi di dalam dan di antara suatu kelompok. Kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan, sikap, dan nilai yang berbeda; mereka yang menggunakan kata-kata yang berbeda; mereka yang menunjukkan keterampilan yang berbeda; dan seterusnya.
2. Kompetisi: Sumber daya kognitif terbatas (cth: perhatian atau ingatan), sehingga tidak semua kepercayaan, sikap, kata-kata, keterampilan, dan sebagainya berhasil dipelajari, diingat, dan/atau diteruskan kepada orang lain melalui pembelajaran sosial. Beberapa varian budaya akan lebih mudah ditransmisikan jika terdapat model budaya (cth: artis, model, tokoh, dsb.)
3. Warisan: Individu mendapatkan keyakinan, keterampilan, nilai-nilai kehidupan, dan sebagainya dari model (orang tua atau yang patut ditiru melalui pembelajaran sosial).

Pada pengertian lain, Claidiere, Scott-Phillips, & Sperber (2014) berpendapat bahwa secara khusus, evolusi budaya lebih tepat dijelaskan dalam istilah dari suatu proses yang disebut atraksi budaya, yang bersifat populasional dan evolusioner, tetapi hanya selektif dalam keadaan tertentu. Selain itu, evolusi budaya juga dapat dipengaruhi secara psikologis, salah satunya dengan kesesuaian (*conformity*). Dalam kesesuaian, setiap individu akan cenderung mempelajari dan beradaptasi atas sesuatu yang menurutnya menarik dalam

suatu kelompok pilihannya (Mesoudi, 2009). Hal ini memungkinkan suatu individu untuk meninggalkan budaya lamanya dan menerima budaya baru sebagai respon atas pilihannya yang dapat berdampak pada perubahan perilaku dan hilangnya budaya asli individu itu.

Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan teori evolusi budaya sebagai landasan berpikir, agar dapat menganalisis perubahan budaya masyarakat Maluku atas sagu setelah masuknya transmigran dengan budaya barunya, salah satunya budi daya pertanian padi. Pemakaian teori evolusi budaya juga didasarkan pada fokus kajian dari teori tersebut yang menjadikan manusia sebagai pusat dari kebudayaan dan melihat aspek kebudayaan bukan hanya sekedar tradisi turun menurun tetapi lebih luas dari itu.

Menurut banyak peneliti, istilah budaya sangat berkaitan dengan penerimaan dan pengimplementasian dari suatu informasi yang berlanjut. Teori evolusi budaya cenderung mendefinisikan budaya sebagai informasi yang mampu memengaruhi perilaku banyak individu yang diperoleh dari sesamanya melalui pengajaran, peniruan, dan bentuk transmisi sosial lainnya (Richerson & Boyd, 2005). Namun, menurut Maurice Bloch, pengertian budaya lebih luas dari sekedar pemberian informasi. Bloch (2012) menjelaskan bahwa budaya adalah hal non-genetik, aliran informasi yang berjangka panjang, dan akan terus bertransformasi karena pada faktanya bahwa manusia memiliki akal dan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan beragam dan banyaknya informasi yang dimiliki, untuk kemudian beberapa di antaranya disampaikan kembali ke orang lain dan begitu selanjutnya. Pada dasarnya, budaya manusia meliputi ide, perilaku, dan artefak/model yang dapat dipelajari dan ditransmisikan antara setiap individu yang dapat berubah seiring waktu (Creanza, Kolodny, & Feldman, 2017).

Berdasarkan penelitian Creanza et al. (2017), pemakaian teori evolusi budaya dapat dikaitkan dengan gen atau keturunan, populasi, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan atas informasi yang diterima oleh setiap individu atau kelompok. Pada penelitian lain, Reyes-Garcia et al. (2016) mencoba menghubungkan teori evolusi budaya dalam berbagai tingkatan proses –temporal, keruangan (spasial), sosial, dan politik-- dengan proses adaptasi budaya yang mana setiap unsur pembentuk budaya dapat dimaknai sebagai bagian dari sistem sosial. Pada penelitian ini, penulis berhipotesis bahwa budaya konsumsi beras yang dibawa oleh para transmigran Jawa membawa perubahan pada budaya pemanfaatan sagu oleh masyarakat Maluku karena mereka harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan (cth: alih fungsi lahan) dan tekanan sosial-politik dari pemerintah.

2. Metode

Penggunaan metode yang tepat dalam penelitian adalah syarat utama dalam mencari data. Mengingat penelitian adalah suatu proses pengumpulan sistematis dan analisis logis terhadap data atau informasi untuk mencapai tujuan, maka pendekatan proses, pengumpulan data dan analisis data yang dibutuhkan adalah kegiatan utama dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*). Kajian pustaka adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan dalam setiap memuali suatu penelitian. Namun, kajian pustaka juga dapat dianggap sebagai suatu metode penelitian karena tidak sedikit penelitian yang memanfaatkan dokumen-dokumen tekstual seperti artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagai dasar dari penelitiannya (Snyder, 2019). Tahapan yang dilakukan dengan metode tersebut meliputi pengumpulan data, pemilahan data, pemrosesan data, pengolahan data, hingga berakhir di kesimpulan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor utama dari perubahan budaya pemanfaatan sagu di wilayah Maluku. Pada penelitian ini, penulis berasumsi bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perubahan budaya suatu masyarakat. Oleh

karena itu, penelitian ini akan lebih berfokus pada kebijakan pemerintah yang (mungkin) menjadi faktor utama dari perubahan budaya pemanfaatan sagu di Maluku.

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak melakukan pengamatan secara langsung dan data dapat ditemukan dari hasil penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu (Irawati, 2013). Wujud data sekunder dapat ditemukan dalam bentuk hasil penelitian, laporan organisasi, maupun data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga penelitian. Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan internet sebagai sumber pengambilan data. Data yang didapatkan kemudian diolah dengan cara mengurutkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan seterusnya. Pemilihan sumber didasarkan pada empat aspek yakni:

1. Akurasi, yakni aspek kredensial penulis
2. *Objectivity*, yakni apakah ide perspektif dari penulis memiliki banyak kegunaan
3. *Persuasiveness* (derajat keyakinan), yakni apakah penulis termasuk dalam golongan orang yang dapat diyakini; dan
4. *Value* (nilai kontributif), yakni apakah argumen penulis meyakinkan, serta memiliki kontribusi terhadap penelitian lain yang signifikan.

2.2 Metode Analisis Data

Pada penelitan ini, penulis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) untuk mengolah data-data sekunder yang dipakai pada penelitian ini. Analisis konten adalah proses intelektual mengkategorikan data tekstual kualitatif ke dalam kelompok entitas serupa, atau kategori konseptual, untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang konsisten antara variabel atau tema. Metode analisis ini digunakan sebagai cara untuk mengurangi dan mengelaborasi data agar memiliki makna. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen seperti artikel jurnal dan laporan-laporan organisasi serta berbagai data tekstual lainnya, termasuk transkrip wawancara, rekaman pengamatan, narasi, respon dari kuesioner, pidato, dan media seperti gambar, foto, dan video (Given, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah negara tropis yang tidak hanya memiliki keanekaragaman flora dan fauna di dalam hutan hujannya, tetapi juga keragaman suku-bangsa, agama, dan budaya yang dipersatukan dalam ideologi Pancasila dengan moto “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Hal tersebut, sayangnya tidak tercermin dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan untuk menjadikan perbedaan yang dimiliki sebagai kekayaan nasional.

Pohon Sagu adalah tanaman asli Indonesia yang memiliki banyak kegunaan selain patinya yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai panganan pokok. Masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya masyarakat Maluku, adalah sebagian besar penduduk Indonesia yang memanfaatkan pohon sagu sebagai sumber panganan pokoknya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti bahan bangunan untuk rumah dan ritual adat. Namun, budaya pemanfaatan sagu di Maluku, khususnya dalam pemanfaatan sagu sebagai sumber pangan mulai tergeser dengan kehadiran beras, sejak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengampanyekan program Transmigrasi dan Revolusi Hijau dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan swasembada pangan terutama dalam produksi beras. Berlakunya kedua program tersebut di tanah Maluku, secara perlahan membawa perubahan budaya pada masyarakat lokal yang pada akhirnya

menerima beras sebagai panganan pokoknya dan mulai meninggalkan sagu. Sagu mulai ditinggalkan karena kurangnya usaha budi daya perkebunan sagu dibandingkan dengan budi daya pertanian padi. Pada satu sisi, Maluku dan sagunya memiliki potensi untuk mencapai tujuan keberlanjutan terutama dalam hal ketahanan pangan. Peran pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pohon sagu serta budaya masyarakat yang memanfaatkan sagu dalam kehidupannya.

3.1 Program Transmigrasi

Pertambahan penduduk yang selalu meningkat setiap tahun akan menimbulkan permasalahan terkait dengan keterbatasan atau berkurangnya lahan serta meningkatnya kemiskinan. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi tekanan jumlah penduduk di wilayah padat penduduk melalui program transmigrasi. Perpindahan penduduk, terutama dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura yang paling padat penduduknya ke wilayah pulau-pulau besar di luar Jawa yang masih jarang penduduknya (Prihatin, 2013). Transmigrasi adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekosistem, dan mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah yang diharapkan dapat memperluas usaha-usaha pembangunan umumnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat baik di daerah asal maupun di daerah penerima. Implementasi Pembangunan transmigrasi sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi di masing-masing wilayah telah berkontribusi dalam pembangunan diantaranya dalam aspek kewilayahan seperti terbentuknya daerah-daerah otonom baru yaitu desa, kecamatan dan kabupaten, aspek pertanian (sesuai komoditas yang dikembangkan). Pada era orde baru wilayah maluku menjadi salah satu wilayah yang dibuka oleh pemerintah untuk berjalannya program transmigrasi, dan berdasarkan data registrasi kependudukan, jumlah penduduk.

Program transmigrasi tidak luput dari berbagai permasalahan yang kompleks seperti perencanaan, penyiapan lahan, kecocokan lahan untuk usaha pertanian, dan masalah sosial antar penduduk. Permasalahan yang dihadapi penduduk lokal yang berada di sekitar unit-unit permukiman transmigran adalah masyarakat lokal belum mendapat sentuhan pemberdayaan yang setara dengan transmigran, sehingga tingkat produktivitas dan pendapatannya masih relatif rendah, serta timbulnya kecemburuan sosial karena adanya perbedaan perlakuan antara transmigran dan masyarakat lokal. Keseluruhan masalah tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran yang sampai saat ini masih belum meningkat (Prihatin, 2013).

Program transmigrasi ke wilayah Maluku berdampak pada berbagai sektor pembangunan, salah satunya sektor pertanian terhadap perubahan penggunaan wilayah sektor pertanian untuk menyediakan jenis-jenis tumbuhan yang biasa dikonsumsi oleh pihak pendatang, salah satunya perubahan wilayah pertanaman sagu menjadi kawasan pertanian padi. Kebiasaan masyarakat pendatang yang bergantung pada beras akan turut berdampak pada kebiasaan konsumsi makanan masyarakat lokal. Perubahan pola konsumsi rumah tangga yang sebelumnya mengonsumsi pangan lokal menjadi beras adalah salah satu dampak dari program pemerintah yang memprioritaskan ketersediaan komoditas beras pada tahun 2012 hingga saat ini.

Perubahan orientasi pangan dapat berdampak pada turunnya produksi pangan lokal. Perubahan pola konsumsi turut berdampak pada perubahan peruntukan wilayah yang akan berdampak pada kondisi lingkungan wilayah tersebut, dari mulai kebutuhan air, tanah, dan faktor alam lain yang dapat menentukan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.

3.2 Revolusi Hijau

Pada era Orde Baru diterapkannya kebijakan mengenai pertanian adalah kebijakan pokok setelah upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan harga terutama komoditas pertanian menjadi konsentrasinya terutama untuk mengendalikan harga setelah ketidak stabilan

kondisi perekonomian pasca tragedi 30 september 1965. Saat tu, Soeharto berkeyakinan stabilitas pangan adalah fondasi bagi stabilitas politik. Langkah pertama ketika Soeharto berkuasa adalah meningkatkan produksi padi. Pada saat yang bersamaan di kalangan dunia pertanian tengah muncul upaya yang disebut Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi pangan. Soeharto membuka investasi asing untuk meningkatkan produksi padi, memperkuat kebijakan pertanian dengan membuat kebijakan harga gabah. Pertanian menjadi program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Revolusi hijau memang mampu mendongkrak produktivitas pertanian tanaman pangan khususnya beras, sehingga Indonesia pada kurun waktu tertentu telah mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Namun, kebijakan revolusi hijau yang dilakukan pemerintahan orde baru telah membuat masyarakat Indonesia melupakan jenis-jenis pangan lokal. Banyak pengetahuan lokal yang menyangkut pertanian dan pangan lokal telah banyak dilupakan oleh kaum tani. Hilangnya jenis pangan lokal masyarakat ini diakibatkan karena revolusi hijau hanya berfokus pada peningkatan salah satu jenis pangan yaitu beras sehingga menghilangkan secara perlahan berbagai jenis pangan lokal (Axelsson & Palacio, 2018; Mariyono, Kompas, & Grafton, 2010). Penerapan Revolusi Hijau di era Orde Baru tampak melalui digalakkannya program Bimas berikut Panca Usaha Tani, yang antara lain berisi: (1) Penggunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; (3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara bercocok tanam (Nugroho, 2018).

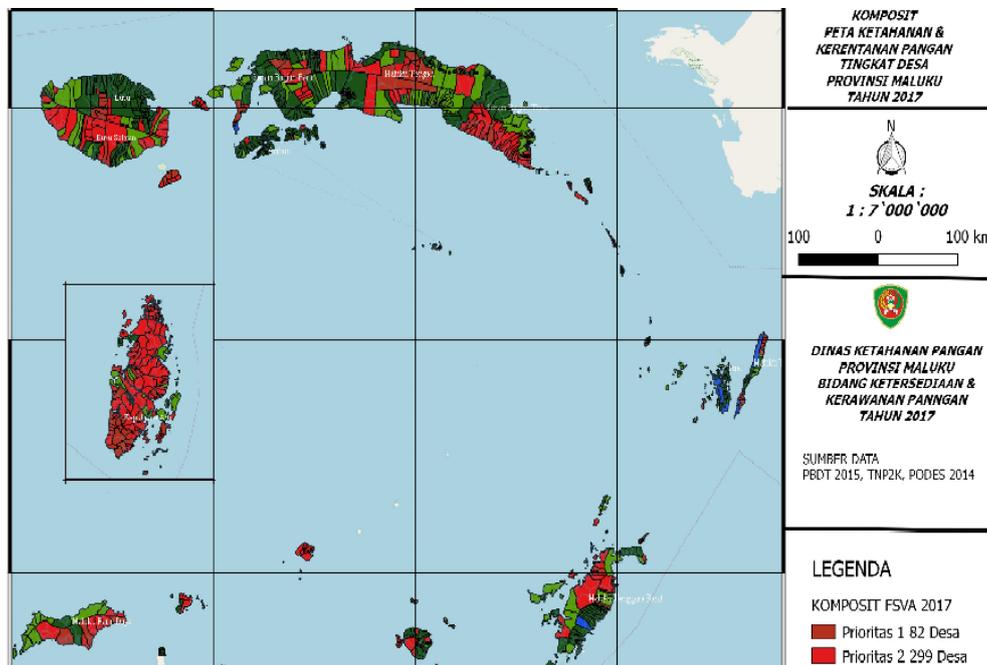
Ketersediaan pangan pada wilayah transmigrasi menjadi bagian utama dalam penentu keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Seiring dengan penerapan kebijakan pemerintah mengenai revolusi hijau dan datangnya pengaruh jenis dan pola konsumsi masyarakat pendatang dari luar wilayah maluku turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat lokal yang berdampak pada kondisi lahan dan kelestarian lingkungan wilayah maluku. Kebijakan pemerintah menjadikan beras menjadi menu pangan pokok bahkan menjadi makanan pertama diberbagai daerah termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok non beras seperti jagung, sagu dan umbi-umbian. (Ariani, 2004).

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat termasuk pada lokasi transmigrasi menyebabkan konsumsi pangan semakin meningkat, ketersediaan bahan pangan tidak dapat mencukupi secara berkelanjutan seiring pertumbuhan penduduk apabila suatu daerah atau negara hanya memiliki satu sumber pangan utama seperti beras, karena pada kondisi saat ini terlihat banyak areal persawahan yang dialihfungsikan menjadi areal pemukiman dan industri yang berdampak pada penurunan produksi beras sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan semakin sulit dan harga beras menjadi semakin tinggi.

Jika dicermati, daerah Maluku memiliki potensi pangan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Maluku. Ketahanan pangan dapat terwujud jika penelitian dan pengembangan keanekaragaman sumber pangan dilakukan secara masif, baik di tingkat nasional (makro) maupun daerah (mikro). Ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal sehingga mampu menghindarkan ketergantungan pada impor. Sagu berpotensi menjadi cadangan pangan di Maluku karena memiliki nilai karbohidrat yang cukup tinggi (Far Far & Saleh, 2016). Dilihat dari jumlah ketersediaannya, cadangan sagu nasional dapat dikatakan cukup atau bahkan lebih untuk mengimbangi cadangan beras nasional. Sayangnya, mayoritas masyarakat Indonesia hanya melihat beras sebagai satu-satunya bahan pangan. Maluku saat ini memiliki sekitar 3,1 juta pohon sagu yang tersebar di tujuh Kabupaten dan Kota dengan tingkat produktivitas rata-rata 25 ton per hektar per tahun, Ini yang perlu disosialisasi untuk tidak bergantung pada beras. Aneka produk pangan lokal daerah sebenarnya memiliki kadar gizi yang lebih tinggi dari beras sehingga pola pikir seperti ini sudah harus diubah (Far Far & Saleh, 2016).

Daya dukung lahan untuk pembangunan terutama yang sesuai bagi pembangunan pertanian adalah luas lahan yang sesuai bagi pembangunan pertanian dan perkebunan berdasarkan persyaratan yang dikehendaki komoditas yang akan diusahakan. Ketersediaan sumberdaya lahan di Provinsi Maluku relatif terbatas disebabkan telah terjadi perubahan

pola konsumsi masyarakat dan ketergantungan masyarakat pada sumber pangan berupa beras serta alihfungsi lahan hutan menjadi perkebunan masyarakat dan pemukiman menyebabkan hutan sagu mengalami penurunan ketersediaan di alam. Kondisi geografis wilayah Maluku mencirikan Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, dengan luas laut yang lebih luas dibandingkan daratan (DPMPTSP-Maluku, 2018).



Gambar 1. Peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi Maluku (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 2018)

Pemerintah berperan dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan pada masyarakat, dengan menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan dapat berkelanjutan. Gambar 1 menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Maluku memiliki tingkat masalah kerentanan pangan yang serius dengan jumlah 82 desa dalam kategori “Prioritas 1” dan 299 desa dalam kategori “Prioritas 2” di tahun 2017. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pendatang dan mulai terpengaruhnya masyarakat lokal untuk bergantung pada konsumsi beras, sedangkan lahan pertanian di Maluku secara keseluruhan tidak cocok ditanami padi. Perubahan perilaku masyarakat dalam hal perubahan konsumsi menjadi beras lambat laun dapat merubah paradigma masyarakat lokal mengenai sumber energi pokok pangan hanya dapat bersumber dari beras. Pengaruh keterbatasan bahan pangan jenis beras dipengaruhi oleh distribusi pangan beras seringkali terkendala dengan medan dan letak geografis daerah Maluku yang berupa daerah kepulauan.

3.3 Kondisi Wilayah Pertanian Maluku

Provinsi Maluku adalah salah satu wilayah kepulauan terbesar dengan memiliki lahan yang penggunaannya lebih didominasi sektor perkebunan, padang rumput ilalang, semak, hutan belukar hutan sejenis maupun tanah kosong yang lebih banyak ditemui pada wilayah pesisir pulau. Umumnya struktur tanah yang ditemui cenderung berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya. Provinsi Maluku dengan kondisi alamnya yang sebagian besar dikelilingi lautan memiliki kondisi wilayah kelautan berdasarkan fisiknya bila dilihat dari suhu sekitar 28°—33°C, hal ini dipengaruhi lamanya penyinaran matahari dan berfungsinya hutan lindung pantai. Selain potensi pertanian, Maluku memiliki potensi yang sangat besar dari sektor perikanan laut. Dengan memiliki kekhasannya yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi Maluku memiliki kekayaan sumberdaya alam yang tidak atau

jarang dimiliki oleh provinsi lainnya (DPMPTSP-Maluku, 2018). Namun pemerintah daerah dan masyarakat setempat belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara optimal untuk pembangunan wilayah secara infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Wilayah daratan di kawasan ini terdiri dari sejumlah pulau besar maupun kecil sebanyak 632 buah pulau dengan 10 persen daratan seluas 85.724 km². Kedudukan pulau-pulau yang berjauhan satu dengan lainnya menjadikan Provinsi Maluku sangat terbuka untuk melakukan interaksi dengan kepulauan lain dari Provinsi diluar Maluku. Tingkat kesuburan tanah yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya menimbulkan keanekaragaman tanaman serta sumberdaya lainnya. Luasnya wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan terbentang dari Utara sampai Selatan, menjadikannya sebagai wilayah memiliki kondisi atau karakteristik beragam sehingga masing-masing pulau memiliki kemampuan atau kapasitas lokal pengelolaan sumberdaya yang berbeda pula. Kawasan budidaya berdasarkan kondisi fisik dan berbagai potensi sumberdaya alam lainnya sangat mempengaruhi produksi dan pemanfaatannya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat (Kembauw, 2017).

Komoditas di Provinsi Maluku lebih didominasi oleh panganan lokal seperti: sagu, kacang merah, ubi kayu, ubi jalar, hasil dari tanaman buah-buahan lokal seperti: duku, cempedak, sukun, salak, durian, manggis, mangga, jeruk, tanaman perkebunan seperti: pala, cengkik, kayu manis, kelapa, kakao, dan hasil peternakan lokal seperti: sapi domba dan kambing (Kembauw, 2017).

3.4 Pemanfaatan Sagu di Maluku

Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Pangan lokal juga adalah hak asasi setiap individu untuk mendapat hak yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menunjang keberhasilan ketahanan pangan penduduk Indonesia harus kembali ke makanan pokok lokal daerahnya masing-masing (Far Far & Saleh, 2016).

Sagu adalah salah satu pangan lokal masyarakat Maluku yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi produksi sagu di Indonesia diperkirakan lima juta ton pati kering per tahun, hasil pertanian dari sagu dapat terus ditingkatkan apabila hutan sagu dapat direhabilitasi dan terus dikelola dengan baik. Sagu adalah salah satu sumber karbohidrat yang sangat potensial di Indonesia, khususnya dalam usaha penganekaragaman pangan. Sagu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Maluku sejak dahulu dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Fungsi sosial dan budaya sagu menjadi bukti bahwa sagu dapat menjadi alat pemersatu bagi masyarakat (Far Far & Saleh, 2016).

Daerah Maluku adalah salah satu kawasan utama penghasil sagu di Indonesia dengan luas area sagu lebih dari 80.000 ha. Seluas 50.000 ha adalah area sagu yang tumbuh alami di dalam hutan (Flach, 1997), sedangkan sisanya tumbuh di atas perkebunan rakyat. Hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku menanam tanaman sagu. Area perkebunan sagu terluas yaitu 35.460 ha terletak di Kabupaten Buru Selatan, menyusul Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 500 ha, Buru – 230 ha, Tual – 176 ha, Maluku Barat Daya – 36 ha, Kepulauan Tanimbar – 26 ha, Seram Bagian Barat – 19 ha, Maluku Tenggara – 14 ha, Maluku Tengah – 8 ha, Kepulauan Aru – 7 ha, dan Kota Ambon dengan 2 ha saja (0.45%) (BPS Provinsi Maluku, 2019).

Potensi produksi tepung sagu basah di Maluku rata-rata 292 kg per pohon dan potensi masa tebang rata-rata 102 pohon/ha, maka produktivitas tepung sagu basah ± 30 ton/ha, jauh melebihi tanaman padi dan jagung (Haryanto, 2015). Sagu dapat tumbuh baik pada daerah rawa air tawar, rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air, atau hutan-hutan rawa. Tumbuhan sagu mempunyai daya adaptasi yang tinggi pada daerah marginal dan lahan kritis yang tidak memungkinkan pertumbuhan optimal bagi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Vita, 2017).

Kandungan kalori pati sagu setiap 100 gram tidak kalah banyak dibandingkan dengan kandungan kalori bahan pangan lainnya. Sagu memiliki kalori sebanyak 343 kal/100g, tidak

kalah dengan beras giling dan tepung jagung yang masing-masing memiliki kandungan kalori sebesar 349kal/100g dan 367kal/100g (Kusuma, Indrianti, & Ekafitri, 2013). Selain itu, efisiensi lahan yang dibutuhkan dengan luasan yang dihasilkan dari sagu, sangat berbanding jauh dengan beras dalam pemenuhan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jika setiap satu hektar lahan hanya mampu menghasilkan 3 ton/ha, maka sagu akan menghasilkan 25 ton/ha. Keuntungan lain dari penanaman sagu adalah kebutuhan air yang lebih rendah dibandingkan padi sawah, rendahnya pengaruh iklim dan penggunaan pupuk, serta gangguan hama dan kebutuhan atas pupuk yang juga rendah (Bantacut, 2011).

Pemanfaatan sagu secara tradisi sudah lama dikenal di daerah-daerah penghasil sagu pada umumnya dan secara khusus di Inanwatan. Produk-produk makanan secara tradisi yang dihasilkan dari sagu seperti papeda, sagu lempeng, sagu lempeng gula merah, sagu bakar kelapa, sagu bakar apatar, dan lain sebagainya adalah produk yang benar-benar terlahir dari sebuah pengetahuan tradisi masyarakatnya termasuk wilayah Maluku (Tulalessy, 2018). Selain itu, pati sagu juga digunakan dalam industri rumah tangga untuk pembuatan makanan ringan seperti bagea, bangket sagu, sagu gula, sarut, dan sagu tumbuk. Serta dapat juga diolah menjadi panganan basah berupa buburnee, dan bubur sagu (Alfons, 2006).

Setiap hektar tegakan sagu pertahun paling sedikit menghasilkan 2,5 ton pati sagu. Kandungan karbohidrat sagu lebih tinggi dibandingkan dengan beras dan beberapa pangan sumber karbohidrat lainnya. Kandungan kalori sagu tidak jauh berbeda dengan beras dan jagung, bahkan melebihi kentang, sukun, ubi kayu, ubi jalar, dan yams (gembili dan uwi/ubi). Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 menyatakan bahwa satu porsi nasi seberat 100 gram setara dengan 40 gram tepung sagu. Menurut (Bustaman, 2015), Pati sagu (*Metroxylon* spp) memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sekitar 85% dibandingkan dengan jagung (71%), dan ubi kayu (24%). Hal ini menunjukkan bahwa sagu sangat berpotensi menggantikan beras yang selalu menjadi sumber karbohidrat utama di Indonesia. Selain itu, sumber mineral lainnya seperti nilai kandungan Kalsium dan Besi lebih tinggi dibandingkan dengan beras (Kusuma et al., 2013). Dengan demikian peluang pengembangan sagu baik sebagai bahan pangan maupun industri memiliki prospek yang menjanjikan (Meilvis E. Tahitu, Saleh, P. Lubis, & Susanto, 2016).

Hasil panen satu pohon sagu rata-rata terdiri dari 20% pati sagu (292 Kg), 28% limbah ampas ela (409 Kg), dan 52% kulit pohon (759 Kg) dari total bobot pohon sagu (Komarayati, 2010). Pati sagu dapat digunakan sebagai sumber pangan, sedangkan limbah pengolahan berupa limbah ampas telah dapat diolah sebagai energi alternatif yakni bioetanol. Pada Tabel 1, dapat dilihat perbandingan sagu dengan beras terkait potensi pemanfaatan, peran penduduk, kesempatan kerja, solusi atas permasalahan energi, dan dampak kesehatannya.

Tabel 1. Perbandingan Beras dan Sagu berdasarkan hasil identifikasi

Identifikasi	Beras	Sagu
Pemanfaatan	Pangan	Pangan dan Energi
Peran Penduduk	Konsumen	Produsen, Konsumen, bahkan distributor
Kesempatan Kerja	Semakin Sempit	Sangat Luas
Solusi Permasalahan Energi	Tidak	Ya
Dampak Kesehatan	Berisiko kepada penderita diabetes	tidak menimbulkan kenaikan kadar glukosa, sehingga aman bagi penderita <i>diabetes melitus</i> dan berbagai masalah pencernaan (Hariyanto, 2011).

(Tuasikal, 2019)

3.5 Peran Negara dalam Keberlanjutan Sagu

Terkait dengan aspek pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan, Peraturan Pemerintah (PP) No 68 tahun 2002 menyebutkan secara tegas tentang pentingnya peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam menangani masalah pangan. Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2011 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu (disebut Perda Sagu) yang diantaranya bertujuan menjamin ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat seperti diatur dalam Pasal 3 Perda Sagu tersebut dengan maksud sagu dapat diandalkan sebagai pangan masa depan dengan kondisi geografis Indonesia yang cocok untuk tanaman sagu, maka dapat diyakini kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dapat tercukupi dengan potensi ketersediaan sagu, meskipun pada saat ini peran sagu sebagai bahan pangan di Maluku mengalami penurunan karena ketersediaan lahan yang terus menurun seiring peningkatan penduduk lokal dan penduduk transmigrasi (Pemerintah Provinsi Maluku, 2011).

Salah satu lembaga pemerintah yaitu Badan Ketahanan Pangan (BKP) Maluku dapat melakukan sosialisasi untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari ketergantungan pada beras menjadi aneka pangan lokal. Badan Ketahanan Pangan Maluku sudah mengusulkan untuk mengubah Raskin Menjadi Pangkin (Pangan Miskin). Pangkin sudah mencakup semua, baik beras maupun umbi-umbian. BKP mencoba melihat kembali kearifan lokal dalam bidang pangan, sehingga tidak ada lagi desa rawan pangan jika konsumsi lokal bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketahanan pangan adalah salah satu urusan wajib pemerintah daerah karena ketahanan pangan berkaitan dengan pelayanan dasar. Tugas pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan penganeekaragaman pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

Pada Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bersama - sama dalam mengupayakan kebutuhan dasar atau pangan. Pangan adalah hal pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemenuhan ketersediaan pangan harus terus digalakan agar tidak terjadi kerentanan pangan. Kerentanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Pada dasarnya terjadinya kerentanan pangan dan kelaparan disebabkan masalah kekurangan pangan akibat antara lain (Nugraha, Hasan, & Samantha, 2015).

1. Rendahnya ketersediaan pangan dari produksi setempat maupun pasokan dari luar.
2. Gangguan distribusi karena kerusakan sarana dan prasarana serta keamanan distribusi.
3. Terjadinya bencana alam menyebabkan suatu
4. Wilayah/daerah terisolasi.
5. Kegagalan produksi pangan
6. Gangguan kondisi sosial.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan peraturan presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Strategi pengembangan konsumsi pangan diarahkan pada tiga hal yaitu produk atau ketersediaan, pengolahan dan pemasaran.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kembali diversifikasi pangan menuju produksi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta yang terpenting adalah berbasiskan sumberdaya lokal (Sutrisno & Idris, 2009). Diversifikasi pangan akan mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan

sumber-sumber pangan lokal yang ada dengan tetap menjunjung tinggi hak atas pangan sebagai hak dasar manusia dan kearifan lokal.

4. Kesimpulan

Masyarakat Maluku adalah sebagian kecil dari total populasi Indonesia yang masih memanfaatkan sagu sebagai panganan pokok dan kebutuhan lainnya seperti bahan bangunan untuk rumah dan bagian dari ritual adat. Kebudayaan masyarakat lokal/asli Maluku secara bertahap mulai berubah sejak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengampanyekan program Transmigrasi dan Revolusi Hijau di Provinsi Maluku. Transmigrasi menyebabkan hadirnya budaya dan informasi baru yang dibawa oleh masyarakat Jawa dan menjadi percontohan bagi masyarakat lokal, salah satunya adalah budi daya pertanian padi. Padi yang ditanam oleh masyarakat Jawa adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka karena panganan pokok mereka bersumber dari tanaman padi, berbeda dengan masyarakat Maluku yang memanfaatkan pohon sagu sebagai sumber pangannya.

Secara bertahap, masyarakat Maluku mulai beradaptasi dengan nasi (produk dari beras) karena sumber panganan padi lebih mudah dijumpai dibandingkan dengan sagu. Sulitnya masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka atas sagu didasarkan pada kurangnya usaha budi daya perkebunan sagu dan giatnya pemerintah dalam mengampanyekan program Revolusi Hijau. Kurangnya usaha dalam pembudidayaan sagu, membuat masyarakat lokal harus melewati medan yang sulit terlebih dahulu ke dalam hutan untuk memanen pohon sagu. Berbeda dari sagu, beras adalah panganan yang mudah dan banyak dijumpai seiring dengan diterapkannya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian padi di wilayah Maluku yang dapat meningkatkan jumlah produksi beras sebagai perwujudan dari Revolusi Hijau.

Budaya pemanfaatan sagu di Provinsi Maluku yang mulai terdegradasi, tidak hanya mempengaruhi aspek sosial pada masyarakat lokal melainkan juga aspek lingkungannya. Ketergantungan masyarakat Maluku terhadap beras, pada akhirnya dapat menyebabkan alih fungsi lahan secara besar-besaran, dari hutan (tempat pohon sagu tumbuh secara alami) menjadi lahan pertanian padi. Pada Tabel 1 telah dijelaskan bahwa sagu memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan beras dan di satu sisi, sagu memiliki potensi yang besar untuk menggantikan posisi beras sebagai panganan pokok sehingga ketahanan pangan nasional dapat tercapai. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan menjadi vital sebagaimana program Transmigrasi dan Revolusi Hijau yang mampu mengubah budaya konsumsi masyarakat Maluku dari sagu ke beras, maka diperlukan kebijakan serupa yang berfokus pada pengembangan dan pelestarian pohon sagu agar budaya pemanfaatan sagu di Maluku khususnya tidak terdegradasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Tidak berlaku.

Pernyataan Dewan Peninjau Etik

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia secara terbuka dalam buku-buku yang dipublikasi serta laman web yang bisa diakses secara bebas.

Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Alfons, J. B. (2006). *Diversifikasi Sumberdaya Sagu Di Maluku | BPTP Maluku*. Ambon: Fakultas Pertanian, Universitas Patimura : Ambon., 2006.
- Ariani, M. (2004). Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 70*, 23–37. Diambil dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/monograph_26_2005_3.pdf
- Axelsson, T., & Palacio, A. (2018). Transforming Indonesia: Structural Change from a Regional Perspective, 1968–2010. In V. Pinilla & H. Willebald (Eds.), *Agricultural Development in the World Periphery: A Global Economic History Approach* (pp. 281–305). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66020-2_11
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2018). Dukung Ketahanan Pangan, BPPT Tawarkan Inovasi Beras Sagu. Diakses pada Desember 1, 2019, dari <https://www.bppt.go.id/teknologi-agroindustri-dan-bioteknologi/3190>
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Kajian Konsumsi Bahan Pokok 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019b). *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bantacut, T. (2011). Sagu : Sumberdaya untuk Penganekaragaman Pangan Pokok. *Jurnal Pangan, 20*(1), 27–40. <https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6>
- Bloch, M. (2012). *Anthropology and the Cognitive Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BPS Provinsi Maluku. (2019). *Provinsi Maluku dalam Angka 2019*. Ambon: BPS Provinsi

- Maluku.
- Bustaman, S. (2015). Strategi Pengembangan Bio-etanol Berbasis Sagu di Maluku. *Perspektif*, 7(2), 65–79. <https://doi.org/10.21082/p.v7n2.2008>.
- Claidiere, N., Scott-Phillips, T. C., & Sperber, D. (2014). How Darwinian is cultural evolution? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 369. <https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0368>
- Creanza, N., Kolodny, O., & Feldman, M. W. (2017). Cultural evolutionary theory: How culture evolves and why it matters. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(30), 7782–7789. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>
- Davidson, J. S. (2018). Then and Now: Campaigns to achieve rice self-sufficiency in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 174(2–3), 188–215. <https://doi.org/10.1163/22134379-17402001>
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. (2018). SIKETAPANG. Diakses pada Desember 29, 2019, dari <https://www.siketapang.dkpmalukuprov.com/wp-content/uploads/2018/10/peta-fsva.png>
- DPMPTSP-Maluku. (2018). Gambaran Umum Maluku. Diakses pada Desember 1, 2018, dari <http://www.dpmpstsp-maluku.com/komoditi-unggulan/gambaran-umum>
- Ehara, H., Susanto, S., Mizota, C., Hirose, S., & Matsuno, T. (2000). Sago Palm (*Metroxylon sagu* , *Arecaceae*) Production in the Eastern Archipelago of Indonesia : Variation in Morphological Characteristics and Pith Dry-Matter Yield. *Economic Botany*, 54(2), 197–206. <https://doi.org/10.1007/BF02907823>
- Ellen, R. (2006). Local Knowledge and Management of Sago Palm (*Metroxylon sagu* ROTTB OELL) Diversity in South Central Seram, Maluku, Eastern Indonesia. *Journal of Ethnobiology*, 26(2), 258–298. https://doi.org/10.2993/0278-0771_2006_26_258_lkamos_2.0.co_2
- Ellen, R. (2016). Nuauulu ritual regulation of resources, sasi and forest conservation in eastern Indonesia. *South East Asia Research*, 24(1), 5–22. <https://doi.org/10.5367/sear.2016.0290>
- Far Far, R. A., & Saleh, A. (2016). Komunikasi Politik Pangan Lokal di Provinsi Maluku. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 78–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.14.1.%p>
- Flach, M. (1997). *Sago palm. Metroxylon sagu Rottb.* (Promoting). Rome: International Plant Genetic Resources Institute.
- Given, L. M. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Diambil dari https://books.google.com/books?id=y_0nAQAAAJ&pgis=1
- Hariyanto, B. (2011). Manfaat Tanaman Sagu (*Metroxylon* sp) dalam Penyediaan Pangan dan dalam Pengendalian Kualitas Lingkungan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29122/jtl.v12i2.1246>
- Haryanto, B. (2015). Potensi dan Pemanfaatan Pati Sagu dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. *Jurnal Pangan*, 24(2), 97–106. <https://doi.org/10.33964/jp.v24i2.23>
- Irawati, Y. (2013). *Metode Pendidikan Karakter Islami terhadap Anak menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional* (UIN Sunan Kalijaga). Diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7745>
- Kembauw, L. J. E. (2017). *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, . (2015). *Transmigrasi: Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Diambil dari <https://ditjenpkp2trans.kemendes.go.id/resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf>
- Komarayati, S. (2010). *Prospek bioetanol sebagai pengganti minyak tanah*. (5), 3–21.
- Kusuma, P. T. W. W., Indrianti, N., & Ekafitri, R. (2013). Potensi Tanaman Sagu (*Metroxylon* sp .) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pangan*, 22(1), 61–75.

- <https://doi.org/10.33964/jp.v22i1.78>
- Mariyono, J., Kompas, T., & Grafton, R. Q. (2010). Shifting from Green Revolution to environmentally sound policies: Technological change in Indonesian rice agriculture. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(2), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13547861003700109>
- Meilvis E. Tahitu, M., Saleh, A., P. Lubis, D., & Susanto, D. (2016). Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelola Sagu Di Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Sosiohumaniora*, 18(1), 39–46. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9355>
- Mesoudi, A. (2009). How Cultural Evolutionary Theory Can Inform Social Psychology and Vice Versa. *Psychological Review*, 116(4), 929–952. <https://doi.org/10.1037/a0017062>
- Mesoudi, A. (2016). Cultural Evolution: A Review of Theory, Findings and Controversies. *Evolutionary Biology*, 43, 481–497. <https://doi.org/10.1007/s11692-015-9320-0>
- Nugraha, A. T., Hasan, S., & Samantha, Y. (2015). Model Pengembangan Kawasan Transmigran, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. *Agribusiness Journal*, 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.15408/aj.v9i1.5071>
- Nugroho, W. (2018). Konstruksi sosial revolusi hijau di era orde baru. *Jurnal Sosial-Ekonomi Dan Agribisnis*, 12(1), 54–62.
- Pemerintah Provinsi Maluku. (2011). Perda Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011. Diakses pada Desember 29, 2019, dari <http://www.jdih.malukuprov.go.id/peraturan/11pdmaluku010.pdf.pdf>
- Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v4i1.487>
- Reyes-Garcia, V., Balbo, A. L., Gomez-Baggethun, E., Gueze, M., Mesoudi, A., Richerson, P. J., ... Shennan, S. (2016). Multilevel processes and cultural adaptation: Examples from past and present small-scale societies. *Ecology and Society*, 21(4). <https://doi.org/10.5751/ES-08561-210402>
- Richerson, P. J., & Boyd, R. (2005). *Not by genes alone*. Chicago: University of Chicago Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sutrisno, S., & Idris, I. M. (2009). Reaktualisasi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. *Jurnal Pangan*. <https://doi.org/10.33964/jp.v18i4.218>
- Tjiptoherijanto, P. (1996). Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 44(4), 355–378. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199618.pdf>
- Tuasikal, D. F. (2019). *Multi-Function Concept To Support Independent Village : Optimalisasi Potensi Sagu Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Mandiri Pangan dan Energi Berbasis Sociopreneurship* (Universitas Muhammadiyah Malang). Diambil dari http://pilmapres.ristekdikti.go.id/file/kti/SARJANA_IPS_DITA_FOMARA_TUASIKAL_19014368_KTI.pdf
- Tulalessy, Q. D. (2018). Sagu Sebagai Makanan Rakyat Dan Sumber Informasi Budaya Masyarakat Inanwatan: Kajian Folklor Non Lisan. *Melanesia : Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa Dan Sastra*, 1(1). <https://doi.org/10.30862/jm.v1i1.740>
- Vita, V. (2017). Etnobotani Sagu (Metroxylan Sagu) Warisan Budaya Masa Sriwijaya di Lahan Basah Air Sugihan, Sumatera Selatan. *Kalpataru*, 26(2), 107–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24832/kpt.v26i2.314>
- Whitten, A. J. (1987). Indonesia's Transmigration Program and Its Role in the Loss of Tropical Rain Forests. *Conservation Biology*, 1(3), 239–246. <http://www.jstor.org/stable/2385880>

Biografi Penulis

Ari Naldi, seorang mahasiswa di Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

- Email: arinaldi11.aa@gmail.com
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

Belathea Chastine, seorang mahasiswa di Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: